Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 15, Nomor 3, September 2024
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Dampak TPT, IPM dan Jumlah Penduduk terhadap Melebarnya Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di Jawa Timur

The Impact of TPT, HDI and Population on the Widening Income Inequality between Regions in East Java

Muara Ati Asri Ariasta, Ririt Iriani Sri Setiawati[*)]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia
**e-mail korespondensi: ririt.iriani.ep@upnjatim.ac.id*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 11 Juni 2024
Disetujui: 24 September 2024
Dipublikasikan: September 2024

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v15i3.10361

Cara Mensitasi :
Ariasta, M. A. A., & Setiawati, R. I. S. (2024). Dampak TPT, IPM dan jumlah penduduk terhadap melebarnya ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *15*(3), 697-713. DOI: 10.33059/jseb.v15i3.10361.

Abstrak

Studi ini dilakukan bertujuan guna mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018-2023. Studi ini menggunakan data sekunder dengan menggabungkan data *cross-section* dan *time series.* Data ini diambil dari website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya dianalisis melalui teknik regresi data panel dengan melakukan uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan pemerataan pembangunan ekonomi pada tiap daerah dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: IPM, Jumlah Penduduk, Ketimpangan Pendapatan, TPT.

Article Info

Article History :
Received: 11 June 2024
Accepted: 24 September 2024
Published: September 2024

DOI Number :
10.33059/jseb.v15i3.10361

How to Cite :
Ariasta, M. A. A., & Setiawati, R. I. S. (2024). Dampak TPT, IPM dan jumlah penduduk terhadap melebarnya ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *15*(3), 697-713. DOI: 10.33059/jseb.v15i3.10361.

Abstract

The study was conducted to determine the influence of the open unemployment rate (TPT), human development index (HDI), and population on income inequality between districts/cities in East Java in 2018-2023. This study uses secondary data by combining cross-section and time series data. This data was taken from the official website of the BPS (Central Statistics Agency) of East Java Province, and then analyzed using panel data regression techniques by carrying out the t-test, f-test and coefficient of determination. The results show that the open unemployment rate does not effect on income inequality, while the human development index and population have a positive and significant effect on income inequality. Based on the results of this research, it is hoped that the government can carry out equitable economic development in each region and the community is expected to play an active role in the economic development process.

Keywords: *HDI, Income Inequality, Total Population, Unemployment Rate.*

2614-1523/©2024 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

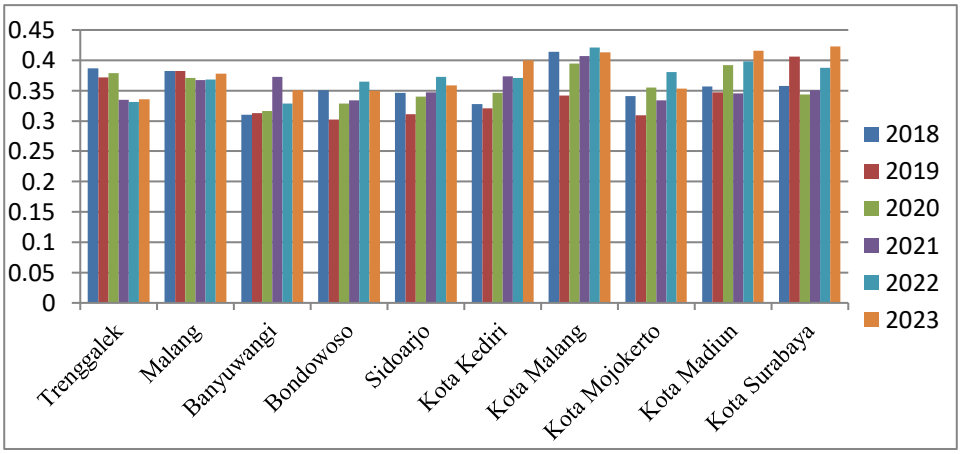
PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu mekanisme yang melibatkan perbaikan sistem suatu kelembagaan dan mengarah pada kenaikan pendapatan perkapita rill suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif panjang (Jintar & Paramitha, 2023). Meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan akhir dari tujuan adanya pembangunan ekonomi dalam suatu daerah. Untuk melihat tingkat sejahtera itu maka digunakan percepatan pertumbuhan ekonomi serta kenaikan penyebaran pendapatan antar wilayah sebagai media pengukur. Kegagalan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan akan menimbukan konsekuensi yang signifikan, termasuk ketimpangan pendapatan. Metamorfosis dari pembangunan sendiri juga akan menimbulkan pelebaran ketimpangan tersebut (Niswah, 2017).

Dalam rencana dan tujuan pembangunan daerah, maka fokus pada pemerataan pendapatan adalah aspek yang paling penting untuk ditindaklanjuti. Untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah, dapat dipertimbangkan pengujian dengan menggunakan PDRB perkapita sebagai indikatornya. Perbedaan tinggi rendahnya PDB tiap daerah ini bisa menimbulkan pelebaran ketimpangan pendapatan antar wilayah, dimana semakin tinggi nilai PDRB daerah dipastikan tingkat kesejahteraan suatu daerah juga relatif tinggi, atau sebaliknya. PDRB dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dikarenakan terdapat perbedaan yang mencolok mengenai sektor penggerak perekonomian pada tiap-tiap wilayah (Kusuma *et al*., 2019). Namun demikian, keadaan perekonomian daerah tidak seluruhnya berdampak pada pelebaran ketimpangan pendapatan. Perbedaan karakteristik akibat perbedaan kapasitas sumber daya serta letak geografis tiap daerah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap munculnya pola pembangunan di Jawa Timur, yang kemudian mengakibatkan pola pembangunan ekonomi tidak merata dan menimbulkan kapasitas pertumbuhan yang berbeda-beda (Pamiati & Woyanti, 2021). Kapasitas pertumbuhan yang berbeda-beda pada tiap daerah ini yang kemudian menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Gambar 1 menunjukkan sebagian rasio Gini kota/kabupaten di Jawa Timur.

Berdasarkan lima pembagian Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah) Jawa Timur, penelitian ini menggunakan 10 Kabupaten/Kota sebagai obyek analisis. Daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan rata-rata rasio Gini tiap daerah dari tahun 2018 hingga 2023, dimana tiap Bakorwil dipilih dua kabupaten/kota. Bakorwil I memiliki Kabupaten Trenggalek dengan rasio Gini tertinggi dari tahun 2018-2020 yaitu 0,38 dan Kota Madiun dengan rasio Gini tertinggi tahun 2023 mencapai 0,42 poin. Bakorwil II terdapat Kota Kediri dimana pada tahun 2023 mencapai rasio Gini 0,4 poin dan Kota Mojokerto dengan rasio Gini tahun 2022 sebesar 0,38. Bakorwil III terdapat Kota Malang dimana pada tahun 2018, 2021 dan 2022 rasio Gini mencapai 0,4 dan Kabupaten Malang mulai tahun 2020 hingga 2023 mencapai rasio Gini lebih dari 0,4. Bakorwil IV terdapat Kabupaten Sidoarjo rasio Gini tahun 2022 mencapai 0,37 dan Kota Surabaya pada tahun 2022 mencapai rasio Gini senilai 0,38 tetapi pada tahun 2019 Kota Surabaya mencapai rasio Gini 0,4 dan pada tahun 2023 mencapai 0,42 poin. Terakhir, Bakorwil V terdapat Kabupaten Banyuwangi dimana rasio Gini 2023 mencapai 0,35 dan Kabupaten Bondowoso dengan rasio Gini 2023 mencapai 0,35 (Badan Pusat Statistik, 2023). Dari penjabaran ini menerangkan bahwa besaran rasio Gini di Kota/Kabupaten di Jawa Timur menandakan kurangnya distribusi pendapatan yang merata. Karenanya dinilai penting untuk menganalisis faktor-faktor yang dinilai memengaruhi ketimpangan pendapatan, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)



Grafik 1. Rasio Gini Kota/Kabupaten Jawa Timur
Sumber: BPS Jawa Timur (diolah), 2023.

Faktor yang dinilai mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu pengangguran, dimana pelebaran ketimpangan pendapatan dapat diminimalisir dengan menekan angka pengangguran. Hampir semua daerah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana tingkat pengangguran setengah lebih banyak (Hindun *et al*., 2019). Hal tersebut dikatakan cukup baik dikarenakan masyarakat yang berada pada tingkat setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja namun mempunyai penghasilan kurang dari tingkat optimalnya, sehingga ketimpangan pendapatan yang timbul dapat dikurangi. Berbeda dengan tingkat pengangguran terbuka yang bisa memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Menurut Arkum & Amar (2022), pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Farhan & Sugianto (2022), ketimpangan pendapatan dipengaruhi signifikan oleh kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, namun pengangguran berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa. Dari studi yang dilakukan Farhan & Sugianto (2022) tersebut menyatakan bahwa melalui bantuan dari pemerintah dapat mendukung kewirausahaan penduduk dengan pelatihan vokasi, maka angka pengangguran resmi dapat dikendalikan sehingga masyarakat Jawa dapat memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja, dan selanjutnya hal tersebut berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan Pulau Jawa.

Faktor lainnya yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan ukuran yang memengaruhi kinerja pembangunan suatu daerah dan mempunyai perspektif yang tentu saja meluap, sebab menunjukkan mutu masyarakat suatu daerah ditinjau dari angka harapan hidup, pendidikan, dan taraf hidup yang memadai (Auria, 2021). IPM memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan dimana dengan meningkatnya IPM bisa menurunkan ketimpangan pendapatan daerah tersebut (Kusuma *et al*., 2019). Terdapatnya ketidakmerataan IPM antar daerah memicu daerah dengan nilai IPM relatif tinggi dapat mempunyai taraf manusia yang lebih tinggi sehingga berakibat sebagai penunjang pembangunan, dan sebaliknya.

Selain IPM dan TPT, jumlah penduduk juga dapat memengaruhi pelebaran ketimpangan pendapatan. Pertambahan populasi dari waktu ke waktu dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan populasi pada suatu wilayah maka berkesinambungan atas tenaga kerja yang semakin bertambah jumlahnya, hal ini dapat meningkatkan output suatu daerah. Akan tetapi jika tidak ada ketersediaan dalam peluang kerja maka pertumbuhan penduduk

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

berdampak buruk sehingga menyebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan melambatnya pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan penurunan pendapatan perkapita suatu daerah.

Menurut studi yang dilakukan oleh Ayu *et al*. (2019) diperoleh bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat berinteraksi dengan faktor jumlah penduduk. Hasil studi milik Lestari (2015) juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan populasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perubahan kesenjangan pendapatan di kota/kabupaten di Pulau Jawa. Sebaliknya, dalam penelitian ini juga diperoleh bahwa kesenjangan pendapatan di kota/kabupaten Jawa Timur dipenguruhi secara signifikan dan negatif oleh inflasi. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi IPM suatu wilayah berdampak pada berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Secara khusus, ketidakkonsistenan IPM antar daerah menyebabkan rendahnya kinerja suatu daerah karena karakteristik masing-masing daerah, dan promosi daerah lain karena karakteristik manusianya (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan masih menjadi persoalan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Karena masalah itu diperlukannya peninjauan berkala agar dapat meminimalisir pelebaran kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan di Jawa Timur juga disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang diperoleh. Perbedaan tersebut berimbas kepada pertumbuhan ekonomi antar wilayahnya, dimana terdapat wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat dan terdapat pula daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Penyebab ketimpangan regional merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling sering terjadi. Ketidakadilan yang paling banyak dibicarakan adalah ketidakadilan ekonomi, dimana ketimpangan dalam pembangunan ekonomi secara alamiah muncul dalam proses pembangunan ekonomi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan infrastruktur yang tersedia di setiap daerah (Iswanto, 2015).

Ketimpangan pendapatan juga adalah permasalahan yang sering terjadi akibat percepatan pembangunan. Di satu sisi, daerah yang kemampuan dan sumber daya ekonominya mapan akan mudah tumbuh, sedangkan daerah yang sumber daya ekonominya sedikit akan sulit mencatatkan pertumbuhan positif (Arif & Wicaksani, 2017). Meskipun Jawa Timur termasuk pusat aktivitas perekonomian di pulau Jawa, tetapi hal tersebut tidak menampik bahwa terdapat beberapa daerah dengan kategori daerah tertinggal yang dapat memperluas kesenjangan pendapatan. Karenanya diperlukan penelitian yang bertujuan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia, dapat mempengaruhi pelebaran ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur.

TELAAH LITERATUR

Ketimpangan pendapatan

Professor Kuznets menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu pendistribusian pendapatan akan melesat meskipun pada tingkat permulaan proses distribusi pendapatan itu cenderung buruk. Pengamatan ini dikenal dengan hipotesis *U-Terbalik*, dinamakan demikian karena berimbang pada keabsahan wujud rentetan perubahan mode distribusi pendapatan berdasarkan ukuran koefisien Gini pertumbuhan (Todaro & Smith, 2020). Studi lain yang berdasarkan hipotesis Kuznets yaitu studi yang dilakukan oleh Jeffery G. Williamson pada tahun 1966 yang menemukan tentang ukuran ketimpangan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

pendapatan yang menegaskan pada kesenjangan antar wilayah di dalam negara, yang dikenal sebagai IW atau Indeks Williamson (Naibaho *et al*., 2020). Williamson menyakini perbedaan rata-rata pennghasilan antar wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat urbanisasi di wilayah tersebut.

Perhitungan PDRB tiap provinsi juga merupakan cara lain untuk menghitung indeks ketimpangan wilayah, karena ketimpangan regional antar wilayah dan ketimpangan regional dalam wilayah merupakan perincian dari indeks ketimpangan regional tersebut. Agar dapat mencermati seberapa jauh disparatif pendapatan antar wilayah pada Provinsi Jawa Timur maka diperlukan indeks Williamson sebagai pengukur (Nurcahyo, 2022). Tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari perolehan nilai Indeks Williamson yang berkisar antara nol hingga satu (positif). Jika suatu daerah memperoleh indeks Williamson lebih dari 0,5 maka daerah itu termasuk daerah dengan ketimpangan relatif tinggi, sementara jika suatu daerah dengan nilai indeks Williamson kurang dari atau sama dengan 0,5 maka termasuk golongan daerah dengan tingkat ketimpangan rendah.

Indeks Gini merupakan metode lain yang dapat diaplikasikan dalam perhitungan kesenjangan pendapatan. Perhitungan koefisien Gini berdasarkan dengan luas total setengah persegi tempat letak kurva *Lorentz* yang dibandingkan dengan luas yang bertumpuk antara kurva dan diagonal (Budiono, 2021). Sebagai pemastian hubungan total pendapatan dengan pendapatan individu atau pendapatan akumulatif anggota keluarga, maka diperlukannya indeks Gini sebagai alat ukur. Serupa dengan IW, jika rasio Gini bernilai nol maka dikatakan bahwa pendistribusian pendapatan dapat berproses secara komplet; tetapi jika rasio Gini hampir mencapai nilai 1 berarti ketimpangan semakin meluas atau memburuk. **(**BPS, 2023).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Seseorang yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan tersebut, seseorang yang mencari pekerjaan atau merancang bisnis baru adalah bagian dari angka pengangguran (BPS, 2024). Menurut Sukirno (2017), gambaran pengangguran merupakan situasi dimana orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang ingin memiliki pekerjaan tetapi belum memiliki pekerjaan; sementara, bagi masyarakat yang tidak rajin mencari pekeraan dan tidak memiliki pekerjaan tidak termasuk golongan pengangguran. Pengangguran dapat dikurangi jika terdapat kenaikan pengeluaran agregat, dimana jika semakin tinggi permintaan jumlah produksi maka perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja yang disebabkan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka terjadi ketika total angka kerja lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas (Retnowati & Harsuti, 2017). Meskipun perekonomian semakin meningkat tetapi tidak diimbangi pertambahan lapangan usaha, maka jumlah pengangguran semakin meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Karenanya, kondisi mereka disebut pengangguran terbuka karena mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu. Pengangguran terbuka juga dapat terjadi akibat berkurangnya kegiatan perekonomian, sebagai akibat peradaban teknologi yang dapat menyingkirkan pendayagunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari menurunnya kelanjutan sebuah industri (Dewi, 2017).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki korelasi erat dengan ketimpangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan karena menurunkan pendapatan total di kalangan masyarakat yang menganggur, menekan upah, dan memperdalam kemiskinan struktural (Hindun *et al*., 2019). Hal ini dibuktikan dalam studi milik Simalango & Setiawati (2024) menunjukkan bahwa TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin besar ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dikarenakan pengangguran berdampak langsung pada pengurangan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kemudian menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan (Sejati, 2020). Pengangguran yang berkepanjangan dapat memicu lingkaran kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang memperburuk situasi.

H1: TPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam pengkasifikasian negara tertinggal, negara berkembang dan negara maju, salah satu indikator yang digunakan mengukur keberhasilan sebuah program pembangunan yang berfokus pada kualitas hidup yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan UNDP tahun 1990, sebagai alat ukur untuk menghitung IPM terdapat tiga elemen yang digunakan sebagai taksiran keberhasilan pembangunan adalah pendidikan yang dihitung berdasarkan rata-rata lama bersekolah, standar hidup yang tercukupi yang ditaksir menggunakan rata-rata pengeluaran pendapatan perkapita, dan angka harapan hidup (Pangesti & Susanto, 2018). Sebagai ekonom dan filsuf yang turut mengembangkan konsep IPM, Amartya Sen menekankan pentingnya "kapabilitas" manusia, yaitu kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. IPM, menurut Sen, adalah ukuran yang lebih baik dalam menilai kemajuan pembangunan dibandingkan indikator ekonomi tradisional, karena mencakup dimensi pendidikan dan kesehatan (Indarti, 2017).

IPM yaitu indeks yang mengukur kualitas pembangunan manusia yang dicapai guna mencapai kehidupan yang berkualitas baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak (BPS, 2024). IPM memberikan gambaran tentang kualitas hidup yang lebih luas dan mendalam dibandingkan hanya melihat aspek ekonomi. Ukuran ini membantu dalam mengidentifikasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang mungkin tidak terlihat hanya dari indikator ekonomi (Setiyaningrum, 2023). Dengan demikian, IPM mempunyai dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya IPM, maka ketimpangan pendapatan menurun (Zusanti *et al*., 2020). Studi oleh Lala *et al*. (2023) yang dilakukan di Sulawesi Utara memaparkan hasil bahwa IPM memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan; berarti semakin tinggi IPM mka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan. Peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan yang tercermin dalam IPM dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas, sehingga bisa mengurangi ketimpangan pendapatan karena lebih banyak individu yang memiliki akses ke pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi (Yoertiara & Feriyanto, 2022). Dengan akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, masyarakat miskin bisa memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan status ekonomi mereka, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan.

H2: IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan teori Malthus yang menuturkan bahwa jumlah penduduk menjurus terhadap pertumbuhan tanpa batas waktu hingga limit suplai pangan tercapai, dalam kondisi ini warga negara akan saling berlomba-lomba mencari sumber pangan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dalam hal ini, terdapat permasalahan ledakan populasi atau kelompok perkotaan yang tidak dipadankan dengan banyaknya cadangan bahkan persediaan makanan, yang jika dilihat dari teori

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Malthus merupakan keseimbangan yang tidak menguntungkan (Conway, 2015). Ketika kompetisi ini berlangsung, terdapat beberapa orang yang kemungkinan tersingkir dan tidak memiliki akses terhadap persediaan pangan. Dalam masyarakat modern, hal ini berarti bahwa pertumbuhan populasi menciptakan lebih banyak pekerja, namun kondisi ini tidak diselaraskan dengan peluang kerja yang mumpuni. Malthus menyarankan bahwa populasi harus dikendalikan melalui yang ia sebut sebagai "*preventive checks*" (seperti penundaan pernikahan dan pengendalian kelahiran) serta "*positive checks*" (seperti penyakit, kelaparan, dan peperangan) yang akan mengurangi jumlah penduduk secara alami (Rahman, 2023).

Teori Malthus dengan jelas menekankan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan penduduk menurut deret ukur terhadap penyediaan pangan menurut deret hitung. Teori Malthus sebenarnya mempertanyakan potensi dorongan lingkungan hidup dan potensi tampung lingkungan hidup. Tanah yang merupakan bagian dari lingkungan alam tidak dapat menghasilkan hasil pertanian yang tidak memadai kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Potensi tanah sebagai salah satu elemen lingkungan hidup semakin berkurang akibat tekanan populasi yang lebih meningkat. Populasi harus beradaptasi dengan standar lingkungan hidup sehingga bencana alam seperti banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian, tidak membebani lingkungan atau melemahkan daya dukung dan ketahanannya.

Teori Modernisasi yang dikemukakan oleh Walt Rostow mengaitkan perubahan dalam struktur kependudukan dengan proses modernisasi dan pembangunan ekonomi. Proses modernisasi dianggap sebagai pendorong utama penurunan tingkat kelahiran dan kematian, seiring dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Ghifari & Kurniawan, 2024). Teori *optimum population* mengemukakan bahwa ada ukuran populasi yang optimal dimana tingkat kesejahteraan ekonomi atau produktivitas maksimum tercapai. Populasi yang terlalu besar atau terlalu kecil menyebabkan penurunan dalam tingkat kesejahteraan (Coleman, 2014). Peningkatan populasi tidak selalu menyebabkan kelangkaan sumber daya. Sebaliknya, peningkatan populasi dapat mendorong inovasi teknologi dan intensifikasi pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi pangan (Subri, 2017).

Penelitian di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Wahyuni & Andriyani, 2022). Kondisi ini dapat diakibatkan jika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap pertambahan tenaga kerja ini dengan cukup cepat, maka ada banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, yang cenderung menekan upah untuk pekerjaan dengan level keterampilan yang rendah. Sebaliknya, pekerja dengan tingkat keterampilan tinggi berpeluang mengalami peningkatan pendapatan, sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan (Arif & Wicaksani, 2017). Di sisi lain, penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, dimana diidentifikasi bahwa apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,48 persen. Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat pemeratan penduduk yang dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk (Raziq & El Hasanah, 2023).

H3: Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder terhadap variabel-variabel yang diteliti. Data sekunder yang digunakan berdasarkan data *cross section* dan *time series* yang dikumpulkan dari 10 kabupaten atau kota terpilih di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah perwakilan. Proses pemilihan tersebut berdasarkan rata-rata *Gini ratio* tertinggi dari tahun 2018-2023 menurut pembagian wilayah Bakorwil (Badan Koordinasi Wilayah). Pada tiap Bakorwil dipilih dua daerah dengan rasio Gini tertinggi, sehingga diperoleh daerah penelitian, yaitu Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Jawa Timur yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dengan periode 2018 hingga 2023.

Metode analisis yang dipakai berupa analisis data panel melalui aplikasi *software* Eviews 12 (Priyatno, 2022). Pengujian pertama yang dilakukan yaitu pemilihan model estimasi regresi data panel paling unggul antara *fixed effect mode, random effect model*, dan *common effect model*. Dalam menentukan model regresi terbaik maka dijalankan pengujian *Chow test, Hausmant test* serta *Langrange Multiplier test* (Viarum & Susilowati, 2024). Setelah ditentukan model regresi terbaik, maka dilakukan uji statistik guna mengetahui akurasi fungsi regresi dalam penentuan nilai tertentu.

Uji statistik yang dianalisis meliputi uji F, uji koefisien determinasi (R^2) serta uji t. Analisis hasil uji parsial dilakukan dengan membandingkan jika nilai *Sig. t* lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa variabel independen bersangkutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; atau sebaliknya, jika nilai *Sig. t* lebih besar dari 0,05 maka dikatakan variabel independen bersangkutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Basuki, 2017). Analisis hasil uji simultan dilakukan dengan membandingkan jika nilai *Sig. F* lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa semua variabel independen yang dianalisis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; atau sebaliknya, jika nilai *Sig. F* lebih besar dari 0,05 berarti semua variabel independen yang dianalisis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Zahriyah *et al*., 2021). Interpretasi uji koefisien determinasi diperlukan untuk menganalisis besaran kontribusi dari semua variabel independen yang dianalisis dalam mempengaruhi variabilitas dari variabel dependen, dengan kriteria bahwa jika nilai *Adj. R-Squared* semakin mendekati 1 maka dinyatakan kontribusi dari variabel-variabel tersebut semakin besar (Riyanto & Hadmawan, 2020).

HASIL ANALISIS

Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

Hasil *Chow test* seperti tersaji pada Tabel 1, diperoleh nilai *prob. Cross-section Chi-Square* sebesar 0,0001 < 0,05. Dari hasil *Chow test* dapat ditentukan bahwa *fixed effect model* lebih unggul dibandingkan *common effect model* (Ghozali, 2018). *Fixed effect model* merupakan model regresi yang digunakan untuk data panel, dengan berasumsi bahwa dismilaritas antar individu dapat diimbangi dengan perbedaan intersep (*crossover*) (Manalu *et al*., 2023). Variabel *dummy* digunakan untuk menangkap perbedaan intersep tersebut, tetapi dengan nilai kemiringan antar individu relative tetap konstan.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 1. Hasil *Chow Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.903647	(9,47)	0.0009
Cross-section Chi-square	33.491411	9	0.0001

Sumber: Data sekunder (diolah), 2024.

Tabel 2. Hasil *Hausman Test*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.475987	3	0.3239

Sumber: Data sekunder (diolah), 2024.

Tabel 3. Hasil *Langrange Multiplier Test*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	11.04898	0.000914	11.04989
	(0.0009)	(0.9759)	(0.0009)

Sumber: Data sekunder (diolah), 2024.

Selanjutnya, dilakukan *Hausmann test* yang memperoleh nilai *prob*. *Cross-section random* sebesar 0,324 > 0,05 (Tabel 2). Hasil uji ini menunjukkan bahwa model *random effect* lebih baik daripada dengan model *fixed effect* (Savitri *et al*., 2021). *Random effect model* merupakan salah satu model estimasi regresi data panel yang memperhitungkan koefisien kemiringan dan intersep konstan yang bervariasi antar individu dan seiring waktu, sehingga model ini membantu mengatasi masalah yang timbul dari *fixed effect model* (Ghozali, 2018). Dengan data panel, *fixed effect model* yang mencakup variabel *dummy* menimbulkan masalah karena model itu kehilangan derajat kebebasannya (Hutagalung, 2022). Setelah melakukan uji Chow dan uji Hausman dan dihasilkan model yang berbeda, maka pengujian *Lagrange multiple* perlu dilakukan selanjutnya untuk menentukan model terbaik yang dipakai dalam menganalisis data.

Hasil uji pemilihan model regresi terakhir yaitu uji *Langrange Multiplier* menunjukkan nilai *prob*. *Cross-section random* sebesar 0,0009 < 0,05 (Tabel 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *random effect model* lebih unggul dibandingkan dengan *common effect model*, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis data penelitian ini dipilih menggunakan model regresi data panel *random effect model* (Priyatno, 2022).

Hasil Uji Statistik

Uji F dilakukan guna melihat dan menaksir seberapa besar pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari TPT, IPM dan jumlah penduduk, terhadap variabel dependen yaitu rasio Gini secara bersamaan (Apriliyanti, 2017). Berdasarkan Tabel 4 ditunjukkan uji uji simultan bahwa nilai *Prob*. *F* sebesar 0,010682 < 0,05. Berdasarkan hasil uji F ini diperoleh bahwa seluruh variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini, yang terdiri dari TPT, IPM dan jumlah penduduk, diperoleh berpengaruh signifikan dan positif secara simultan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Zahriyah *et al*., 2021).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel dengan REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.124678	0.151763	-0.821528	0.4148
TPT	0.000997	0.002043	0.488079	0.6274
IPM	0.003484	0.001247	2.793668	0.0071
JP	0.003060	0.001309	2.338503	0.0230
Weighted Statistics				
Root MSE	0.022907	R-squared		0.179882
Mean dependent var	0.177556	Adjusted R-squared		0.135947
S.D. dependent var	0.025508	S.E. of regression		0.023711
Sum squared resid	0.031484	F-statistic		4.094295
Durbin-Watson stat	1.689668	Prob(F-statistic)		0.010682
Unweighted Statistics				
R-squared	0.173404	Mean dependent var		0.360283
Sum squared resid	0.046643	Durbin-Watson stat		1.140503

Sumber: Data sekunder (diolah), 2024.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t-hitung	*Prob. t*
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	0,488	0,6274
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	2,794	0,0071
JP (Jumlah Penduduk	2,338	0,023

Ket: Variabel terikat = *Gini Ratio*
Sumber: Data sekunder (diolah), 2024.

Berikutnya, uji koefisien determinasi dilakukan guna mengukur sejauh mana kesanggupan variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat (Riyanto & Hadmawan, 2020). Kriteria yang digunakan adalah nilai *Adjusted R-Squared* dibandingkan dengan nilai R^2. Hal ini dilakukan karena nilai *Adj. R-Squared* dipandang lebih kredibel dibandingkan nilai R^2 yang akan terus meningkat jika terdapat penambahan sampel tanpa melihat signifikansinya (Syarief *et al*., 2024). Hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan nilai *Adj. R-Squared* sebesar 0,136. Hasil ini menyatakan bahwa variabel independen yang terdiri dari TPT, IPM dan jumlah penduduk menurut angkatan kerja , dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu *Gini ratio* (ketimpangan pendapatan) sebesar 13,6 persen dan sisanya dapat dipaparkan oleh variabel-variabel lain diluar dari model penelitian ini (Ghozali, 2018).

Uji t dilakukan guna menguji atau menerangkan apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen, dengan kriteria bahwa apabilai nilai *prob. t* lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan Tabel 5 diperoleh hasil uji t untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut. Variabel TPT memperoleh nilai *prob. t* sebesar 0,63 > 0,05 sehingga dinyatakan bahwa variabel ini secara parsial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; dengan demikian, hipotesis pertama (H1) tidak dapat diterima.

Selanjutnya, variabel IPM memperoleh nilai *prob.t* sebesar 0,0071 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa variabel ini secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan;

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dapat diterima kebenarannya. Variabel jumlah penduduk memperoleh nilai *prob. t* sebesar 0,023 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa variabel ini secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) juga dapat diterima kebenarannya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota Jawa Timur tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara individu. Hasil ini karena sebagian besar masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan dan reparasi motor dan mobil, yang menyebabkan tidak terdapatnya pengaruh satu sama lain (BPS, 2023). Sebagian masyarakat Jawa Timur yang bekerja pada sektor industri pengolahan diidentifikasi kurang lebih sebanyak 19 juta jiwa, sektor perawatan dan reparasi sepeda motor adan/atau mobil kurang lebih sebanyak 26 juta jiwa, serta sektor pertanian,kehutanan dan perikanan yang juga merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Jawa Timur dengan total kurang lebih sebanyak 39 juta jiwa (BPS Jawa Timur, 2023).

Tidak berpengaruhnya TPT terhadap kenaikan atau penurunan ketimpangan pendapatan dikarenakan tiga sektor sumber penghasilan utama tersebut bergerak sesuai permintaan pasar. Dapat digambarkan jika satu waktu mereka menganggur karena tidak adanya pesanan, maka tidak menutup kemungkinan mereka memperoleh pendapat karena esok atau hari lalu mereka memperoleh pesanan atau permintaan. Karenanya ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tidak dipengaruhi oleh TPT dimana pengangguran terbuka tersebut timbul dari ketiga faktor ini yang masih memiliki sumber penghasilan meskipun tidak tetap. Teori pengangguran struktural menyoroti adanya ketidakcocokan antara ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja dalam kualifikasi yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan akibat terjadi ketidakcocokan antara ketrampilan yang dimiliki oleh individu dengan permintaan pasar tenaga tersebut (Adriyanto *et al*., 2020). UMR serta TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur pada tahun 2012-2015 dikarenakan TPT di Jawa Timur masih relatif rendah dan kesempatan kerja juga rendah, serta peningkatan UMR yang condong di sektor industri tidak berpengaruh kepada pelaku sektor pertanian (Hariani, 2019).

Tidak berpengaruhnya TPT terhadap tingkat ketimpangan di Pulau Jawa juga dapat disebabkan oleh pengaruh kebijakan pemerintah seperti program Bansos serta terdapat program pelatihan kerja dan/atau usaha yang dapat meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja bagi masyarakat di Pulau Jawa (Sahal, 2023). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hindun *et al*. (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti bantuan sosial dari pemerintah. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nadya & Syarief (2019) dimana pengangguran menunjukkan tanda ketimpangan yang negatif dan signifikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh distribusi penduduk yang merata pada golongan bawah, karena menurut Bank Dunia bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dengan level pendapatan yang dihasilkan relatif rendah.

Hasil lain dari penelitian ini menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota Jawa Timur memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial. Dengan meningkatnya IPM menggambarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut, dimana mencerminkan keberhasilan sebuah program pembangunan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

ekonomi pada daerah itu. Menurut UNDP, terdapat tiga faktor pokok dalam mengukur IPM guna mengetahui keberhasilan pembangunan, yaitu harapan hidup yang panjang, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang layak (Yektiningsih, 2018). Investasi dalam sumber daya manusia inilah yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi ini bisa berupa perawatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Karenanya peningkatan investasi dalam sumberdaya manusia ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Febriyani & Anis, 2021).

IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena tidak meratanya nilai IPM yang berakibat pada perbedaan kualitas manusia, yang kemudian berakibat dalam memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan (Yanto, 2020). Jika kualitas SDM daerah tersebut tinggi maka bisa meningkatkan kecakapan masyarakat daerah tersebut, sehingga mudah memperoleh pekerjaan dengan upah yang tinggi dan meningkatkan output daerah tersebut. Di sisi lain, pada daerah ber SDM rendah, maka mereka dapat kalah bersaing dengan daerah ber-SDM tinggi dalam mencari pekerjaan akibat minimnya pengetahuan mereka dalam dunia kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Harahap (2022) yang memaparkan hasil bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Sumatera Utara. Ketimpangan ini diperparah jika tidak terjadi kemerataan IPM, dimana jika suatu daerah dengan IPM relatif tinggi maka seiring waktu mengalami kenaikan sehingga memperparah perbedaan tersebut. IPM mempunyai dampak yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah tata ruang di Yogyakarta karena IPM mencerminkan besarnya pelayanan pembangunan baik berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. (Kusuma *et al*., 2019).

Terakhir, dalam penelitian ini diperoleh jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan secara individu terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur. Berdasarkan teori Malthus, menyatakan bahwa jika pertumbuhan populasi terus berlanjut tanpa terkendali, maka pada suatu titik akan terjadi ketegangan antara pertumbuhan populasi dengan ketersediaan sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena populasi yang banyak bisa memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Rahman & Putri, 2021). Jumlah penduduk merupakan permasalahan mendasar dalam proses pembangunan suatu daerah, karena tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk maka berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat serta menekan kemiskinan (Putra & Setiawati, 2023). Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka menyebabkan peningkatan dalam persaingan dunia kerja, maka seseorang dengan kualitas SDM rendah akan kalah dalam persaingan kerja yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Kondisi ini bisa mempertinggi tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan juga meningkat (Wahyuni & Andriani, 2022)**.**

Akibat dari kondisi tersebut, bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, maka mereka akan menganggur dan kehilangan sumber pendapatan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga dapat mengakibatkan penurunan upah. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan apabila mereka membuka lowongan kerja dengan kuota menerima pekerja lebih banyak, sehingga perusahaan bisa menurunkan tingkat upah agar dapat meminimalisir pengeluaran. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang telah dilaksanakan oleh Rizkia & Andriyani (2023) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dimana jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun, yang berarti ketimpangan pendapatan kemungkinan besar akan meningkat jika penyebaran penduduk tidak merata (Matondang, 2018).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

SIMPULAN

Hasil analisis regresi data panel berkesimpulan bahwa TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur, sementara jumlah penduduk dan IPM terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil ini menyatakan semakin tinggi ketidakmerataan peningkatan IPM antar daerah bisa memperparah ketimpangan pendapatan antar daerah tersebut. Kondisi ini bila diikuti semakin meningkatnya jumlah penduduk maka dapat semakin ketat pula persaingan dalam memperoleh pekerjaan, sehingga masyarakat dengan kualitas SDM rendah akan kalah bersaing dalam dunia kerja dengan masyarakat yang memiliki SDM tinggi dan berakibat ketimpangan pendapatan.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut diharapkan pemerintah provinsi Jawa Timur dapat melakukan pemerataan pembangunan perekonomian di tiap daerah terutama pada daerah tertinggal. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan terus berinovasi dan bervariatif dalam pengembangan program pelatihan prakerja sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM dalam tiap daerah. Bagi masyarakat, diharapkan turut andil dalam proses pembangunan ekonomi dengan mengikuti pelatihan agar menambah wawasan dalam dunia kerja. Masyarakat juga dapat berinovasi dalam industri pengolahan dan menciptakan lapangan kerja baru. Bagi peneliti selanjutnya dapat lebih bervariasi dalam memilih variabel-variabel independen untuk memahami hubungan pengaruh atas ketimpangan pendapatan sehingga beragam dan mewakili faktor secara keseluruhan serta terkini.

REFERENSI

Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan kerja dan faktor yang mempengaruhi pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, *11*(2), 66–82. https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965.

Aprilyanti, S. (2017). Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (Studi kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem Dan Manajemen Industri*, *1*(2), 68-72. https://doi.org/10.30656/jsmi.v1i2.413.

Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan pendapatan Propinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328. https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1342.

Arkum, D., & Amar, H. (2022). The influence of economic growth, human development, poverty and unemployment on income distribution inequality: Study in the Province of the Bangka Belitung Islands in 2005-2019. *Jurnal Bina Praja*, *14*(3), 413–422. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.413-422.

Auria, I. (2014). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tenaga kerja, dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. *Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58817/1/INDIRA%20AURIA-FEB.pdf.

Ayu, D. F., Riani, W., & Haviz, M. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2016. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, *5*(1), 214–220. http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.16016.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Gini ratio tertinggi menurut kota/kabupaten di Jawa Timur 2018-2023*. Badan Pusat Statistik. https://jatim.bps.go.id/indicator/23/488/1/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html.

Basuki, A. T. (2017). *Pengantar ekonometrika (Dilengkapi penggunaan Eviews)*. Danisa Media.

Bigsten, A., Collier, P., Dercon, S., Fafchamps, M., Gauthier, B., Willem Gunning, J., Isaksson, A., Teal, F., & Zeufack, A. (1998). *Rates of return on physical and human capital in africa's*

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

manufacturing sector. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:b9eb0e85-d212-4713-972c-0f701f1389bc.

BPS. (2023). *Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin tahun 2023*. Badan Pusat Statistik. https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/04/06/2657/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-timur-2022.html.

BPS. (2024). *Indeks pembangunan manusia*. BPS Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html.

Budiono, B. (2021). Penurunan indeks Gini pendidikan: Indonesia, Jawa Tengah dan Magelang. *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, 18*(2), 251-260. https://doi.org/10.31315/be.v18i2.5641.

Coleman, W. (2014). Theorising optimal population between the wars: the Contribution of Australian economists. *History of Economics Review*, *59*(1), 44–61. https://doi.org/10.1080/18386318.2014.11681255.

Conway, E. (2015). *50 gagasan ekonomi yang perlu anda ketahui*. Esensi Erlangga Group.

Dewi, S. (2017). Pengangguran terbuka: Kasus di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, *9*(1), 43–46. https://doi.org/10.35968/jmm.v9i1.494.

Erauskin, I. (2020). The labor share and income inequality: Some empirical evidence for the period 1990-2015. *Applied Economic Analysis*, *28*(84), 173–195. https://doi.org/10.1108/AEA-04-2020-0028.

Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(4), 243–258. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29.

Febriyani, A., & Anis, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *3*(4), 9-16. https://doi.org/10.24036/jkep.v3i4.12375.

Ghifari, C., 'Ainul, Y. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Analisis teori modernitas terhadap dampak transformasi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, *1*(3), 51–56. https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/1813.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, S. H. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(3), 1503–1512. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1011.

Hariani, E. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business Tijab*, *3*, 13–23. https://erepository.uwks.ac.id/5356/.

Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *8*(3), 250-265. https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721.

Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM) (Studi kasus: IPM Sumatera Utara periode 2014–2020). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, *5*(2), 217–226. https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia dalam pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *3*(1), 35–50. https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727.

Iswanto, D. (2015). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *4*(1), 41–66. https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2293.

Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4), 23–43. https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183.

Jintar, C., Kurnia, S., & Paramita, B.(2023). *Ekonomi pembangunan*. CV Azka Pustaka.

Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, *1*(3), 282–293. https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i3.799.

Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2023). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (Studi pada kota–kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Efisiensi*, *23*(1), 61–72. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/45150.

Lestari, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tahun 2008-2012*. Digital Repository Universitas Jember. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73804.

Manalu, N. Y. B., Moeljadi, M., & Widiastuti, N. P. E. (2023). Dampak pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit dan financial technology terhadap profitabilitas bank konvensional masa pandemi Covid-19. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(3), 489–502. https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.7057.

Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, *2*(2), 255–270. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v2i2.715.

Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, *27*(1), 37–52. https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300.

Naibaho, G. O., Mandei, J. R., & Pangemanan, L. R. J. (2020). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, *16*(3), 369-378. https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093.

Niswah, F. (2017). Analisis pengaruh variabel struktur ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, kredit investasi, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *6*(1), 1–12. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4315.

Nurcahyo, A. M. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan antar daerah di Jawa (Studi kasus 38 kabupaten/kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FE*B, *10*(1), 1-9. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8198.

Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis pengaruh populasi, pertumbuhan ekonomi, TPAK dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di kawasan barlingmascakeb 2013-2019. *Business Economic Entrepreneurship*, *4*(1), 18–28. https://doi.org/10.61689/bisecer.v4i1.218.

Pangesti, I., & Susanto, R. (2018). Pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *5*(1), 70-81. https://doi.org/10.30998/jabe.v5i1.3164.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *6*(2), 115–285. https://jurnal.harian regional.com/eep/id-27275.

Putra, M. D. P., & Setiawati, R. I. S. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, *11*(1), 150–157. https://doi.org/10.24127/pro.v11i1.7894.

Priyatno, D. (2022). *Olah data sendiri analisis regresi linier dengan SPSS dan analisis regresi data panel dengan EViews*. Cahaya Harapan.

Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *3*(6), 1-18. https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5348.

Rahman, A. (2023). *Ekonomi demografi dan kependudukan*. Nas Media Pustaka.

Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *3*(3), 37-48. https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12368.

Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *2*(1), 12–21. https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art2.

Retnowati, D., & Harsuti. (2017). Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal&Proceeding FEB Unsoed*, 608–618. https://core.ac.uk/download/pdf/ 267947756.pdf.

Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen*. Deepublish.

Rizkia, C. T., & Andriyani, D. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan kabupaten-kabupaten wilayah timur Provinsi Aceh. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 38–48. https://doi.org/10.29103/jaie.v1i2.10317.

Sahal, A. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2021. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia. https://dspace.uii.ac.id/handle/ 123456789/45986.

Savitri, C., *et al*. (2021). *Statistik multivariat dalam riset*. Editor: Ahmaddien. CV. Widina Media Utama.

Sejati, D. P. (2020). Pengangguran serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, *2*(3), 98–105. https://doi.org/10.54783/ jin.v2i3.313.

Setiyaningrum, R. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 445–457. https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.20065.

Simalango, M., & Setiawati, R. I. S. (2024). Analisis faktor yang memperngaruhi ketimpangan pendapatan di kawasan Gerbangkertosusila. *6*(2), 433–442. https://doi.org/10.37479/ jeej.v6i2.24911.

Subri, M. (2017). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. Rajawali Pers.

Sukirno, S. (2017). *Makroekonomi teori pengantar*. Rajawali Press.

Syarief, A., Tsumu, D. A., Nurdiana, M., Bahtiar, A. R., Haitham, Mustofa, Prasetya, D., & Libyawati, W. (2019). Analisis proses perakitan tempat tidur lansia dengan beban kerja aman 180 kg menggunakan pendekatan linear regresi, distribusi normal dan kapabilitas proses. *Jurnal Ilmiah Teknobiz*, *14*(2), 125–131. https://doi.org/10.35814/teknobiz.v14i2.7183.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson Education Limited. https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development.

Viarum, A., & Susilowati, D. (2024). Determinan kemiskinan di wilayah metropolitan "Kedungsepur" Jawa Tengah. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(2), 455–468. https://doi.org/10.33059/jseb.v15i2.9213.

Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh inflasi, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provindi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *5*(1), 39-47. https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7919.

Yanto, A. D. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, serta jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9*(1), 1-11. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7006.

Yektiningsih, E. (2018). Analisis indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *18*(2), 32–50. https://doi.org/10.30742/jisa1822018528.

Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(1), 92–100. https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9.

Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika teknik dan aplikasi dengan SPSS*. Mandala Press.

Zusanti, R. D., Sasana, H., & Rusmijati. (2020). Analisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, dan tpt terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa 2010-2018. *Directory Journal of Economic*, *2*(3), 602–615. https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i3.141.